



JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN

ISSN : 2302 - 9595
Volume 2 No 3 September 2013

JEP

**EDISI KHUSUS
DIES NATALIS UNILA**

*Analysis of State Securities Indonesian Government
(Periode 2000-2010)*
Dedy Yulawan

Determinants Of Human Development In Lampung Province
Prayudha Ananta

Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Daerah Tertinggal Sebagai
Upaya Mengatasi Disparitas Pendapatan Antar Daerah
Di Provinsi Lampung
Atin Susanti

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Di Indonesia Tahun 1992 - 2011 (Kajian Dari Sisi Fiskal)
Andre Avatara

Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah
Terhadap Imbal Hasil Sukuk Mudharabah Di Indonesia
Amalia Febriani, Nairobi, Tiara Nirmala

Studi Komparatif Antara Kesehatan Perbankan Syariah Dengan
Perbankan Konvensional Sebelum Krisis (2007), Saat Krisis (2008),
Dan Pasca Krisis (2009) Di Indonesia
Lintang Puspita Ramadani, Heru Wahyudi



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA**

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila
Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng
Bandar Lampung 35145

Determinants Of Human Development In Lampung Province

Prayudha Ananta

(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Lampung)

ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence on the influence of GDP per capita, education function of government expenditure, health function of government expenditure, and the influence of all these determinants together on the Human Development Index in Lampung Province. The secondary data as used in the research such as panel data from 10 regency/city of Lampung Province from the period 2006 until 2010. The analytical tool used is multiple regression method of Ordinary Least Square (OLS) approach to Fixed Effect Model. The research finding indicate that GDP per capita, education function of government expenditure, health function of government expenditure have a positive and significant impact on the Human Development Index (HDI) of Lampung Province.

Key Words: GDP per capita, education function of government expenditure, health function of government expenditure, Human Development Index, OLS

Pendahuluan

Latar Belakang

Peningkatan kualitas manusia merupakan sasaran utama pembangunan ekonomi, ini berarti bahwa semua sumberdaya yang diperlukan dalam pembangunan harus dikelola untuk meningkatkan kapabilitas manusia (UI Haq, 1998). Menurut Sen (1999) salah satu pelopor pendekatan pembangunan manusia dalam Ilmu Ekonomi Pembangunan melalui konsep *human capabilities approach* dia menekankan pada gagasan kemampuan manusia sebagai tema sentral pembangunan ekonomi. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran UNDP (*United Nations Development Program*) yang diterjemahkan ke dalam beberapa indikator sosial-ekonomi yang menggambarkan kualitas hidup dalam beberapa

ukuran kuantitatif, seperti kemampuan ekonomi, kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan untuk hidup lebih panjang dan sehat (Ranis, 2004:1).

Dimensi pembangunan sosial-ekonomi mencakup dan terkait dengan beberapa tema utama, antara lain prestasi perekonomian, kenaikan taraf kesehatan, angka harapan hidup serta perluasan distribusi pendidikan. Secara umum, UNDP mendefinisikan pembangunan manusia (*human development*) sebagai perluasan pilihan bagi setiap orang untuk hidup lebih panjang, lebih sehat dan hidup lebih bermakna (UNDP, HDR 1990). Memperluas pilihan manusia berarti mengasumsikan suatu kondisi layak hidup yang memungkinkan manusia memperoleh akses untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup secara layak (Chakraborty, 2002). Secara ringkas, Ranis dan Stewart (2000;2) mengartikan pembangunan manusia sebagai peningkatan kondisi seseorang sehingga memungkinkan hidup lebih panjang sekaligus lebih sehat dan lebih bermakna.

Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada pertumbuhan, pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan dasar (Bappeda, BPS 2011). Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk melihat pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, namun sejak publikasi pertama dari Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Reports*) pada 1990 oleh UNDP, *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibuktikan sebagai indikator pengukuran pembangunan manusia di seluruh dunia (Lai, 2003). Hal ini didukung oleh Bagolin (2004), secara umum IPM merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu negara karena dalam batas-batas tertentu IPM mewakili tujuan dari pembangunan manusia.

Nilai IPM Provinsi Lampung selama periode 2002 hingga 2011 terus mengalami peningkatan, namun hal ini jika dibandingkan dengan tingkat IPM daerah lain, peringkat Provinsi Lampung secara nasional mengalami penurunan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena secara letak geografis, Lampung memiliki letak yang sangat berdekatan dengan ibukota DKI Jakarta, dan Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera.

Perbedaan dalam pencapaian indeks pembangunan manusia antar provinsi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan, sehingga pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006).

Berkaitan dengan itu, beberapa penelitian yang menjelaskan tentang determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi IPM telah banyak diteliti oleh para ahli. Penelitian Adeyemi, et. al (2006) yang menjelaskan bahwa dalam penelitiannya bahwa determinan IPM di Sub-Sahara Afrika terdiri dari: (1) indikator makroekonomi yang ditunjukkan oleh GDP deflator; (2) Akses terhadap sumber daya ekonomi yang ditunjukkan oleh pendapatan per kapita; (3) Layanan pembayaran utang berpengaruh negatif terhadap IPM; (4) Perdagangan internasional yang diproxkan oleh *net export* (ekspor netto); (6) Asupan gizi yang ditunjukkan oleh asupan kalori per capita; (7) Kemajuan teknologi yang ditunjukkan oleh jumlah orang per 1000 orang yang menggunakan telepon genggam; (8) Persentasi populasi yang memiliki akses fasilitas sanitasi; (9) Persentasi populasi dengan akses sumber air bersih; (10) Persentasi populasi yang bisa dicapai sesuai dengan pelayanan kesehatan oleh transportasi lokal; (11) Total populasi masyarakat dewasa berumur 15 tahun atau lebih yang dapat membaca dan menulis, (12) Total populasi masyarakat yang berumur 15-69 tahun yang terkena HIV/AIDS, dan (13) Bantuan luar negeri yang diterima dari pemerintah atau organisasi luar negeri.

Ranis, et. al (2000) menyatakan dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitiannya, variabel yang digunakan adalah IPM, GDP per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, Distribusi Pendapatan, pendaftar pendidikan dasar wanita, tingkat melek huruf, angka harapan hidup, investasi domestik. Hasil penelitian dibedakan menjadi dua rantai, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan pengaruh dari pembangunan

manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. (1) Pada rantai pertama ditemukan bahwa pembangunan manusia yang diwakili oleh angka harapan hidup secara signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan GDP perkapita, belanja pemerintah untuk pelayanan bidang sosial (pendidikan dan kesehatan) dan distribusi pendapatan, sementara apabila tingkat pendaftar pendidikan dasar penduduk wanita dimasukkan kedalam persamaan hasilnya menunjukkan kurang signifikan. (2) untuk rantai kedua (pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi) ditemukan bahwa pertumbuhan pendapatan perkapita secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat melek huruf, angka harapan hidup dan investasi domestik.

Razmi (2012) juga menggunakan beberapa determinan seperti GDP per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran bidang kesehatan. Kemudian penelitian Ram (2009) juga mendukung salah satu temuan dari Razmi, bahwasanya salah satu dari sepuluh temuan penelitiannya adalah terdapat hubungan yang sangat erat antara pendapatan per kapita dengan peningkatan IPM.

Rumusan Masalah

Dari berbagai hasil penelitian antara faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
4. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

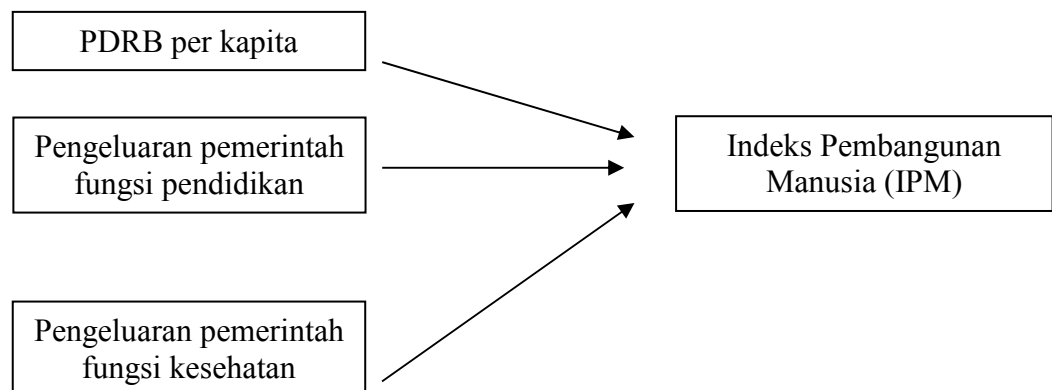
Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
3. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
4. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan secara bersama-sama terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1. Penelitian ini akan menggunakan PDRB per kapita; pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan sebagai determinan IPM Provinsi Lampung.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diduga:

1. PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
2. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.

3. Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung.
4. Secara bersama-sama PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung.

Tinjauan Pustaka

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Sebagai contoh, IPM tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksetaraan dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004).

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk

mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya

rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity*

Index (PPP) (Bappeda, BPS, 2007). IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari satu daerah/negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan status standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan dan pengeluaran per kapita.

Secara lebih lengkap, tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu (1) Dimensi ekonomi yang diwujudkan oleh kehidupan yang layak dan diukur dengan indikator pengetahuan per kapita riil; (2) Dimensi sosial, diwujudkan oleh tingkat pengetahuan dan diukur oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (3) Dimensi kesehatan, perwujudannya adalah umur panjang dan sehat dengan indikator yaitu angka harapan hidup saat lahir (Siregar *dalam* Hidayat, 2008). Angka Harapan Hidup ketika lahir merupakan suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk yang dilahirkan pada tahun tersebut. Angka Harapan Hidup ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur indikator kesehatan. Semakin tinggi Angka Harapan Hidup (AHH) suatu masyarakat mengindikasikan tingginya derajat kesehatan masyarakat tersebut.

Merujuk pada ke tiga indikator IPM, maka angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus (BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004):

$$IPM = \frac{1}{3} \times (IHH + IPd + IP)$$

Keterangan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

IK = Indeks Harapan Hidup

IPd = Indeks Pendidikan

IP = Indeks Pendapatan

IPM mencoba untuk memberikan peringkat semua negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga 100 (tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi).

Tabel 1. Kriteria Pemeringkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Kategori
< 50	Rendah
$50 \leq \text{IPM} < 66$	Menengah bawah
$66 \leq \text{IPM} < 80$	Menengah atas
≥ 80	Tinggi

Sumber: BPS, Bappenas, UNDP (2004)

Metode Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan pembangunan manusia Provinsi Lampung periode 2006 hingga 2010. Determinan tersebut adalah PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan.

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), maupun sumber data sekunder lainnya. Data berupa data panel tahun 2006 hingga tahun 2010. Pemilihan data panel karena adanya keterbatasan banyaknya data bila dilakukan dengan *time series* maupun *cross section*. Hal ini mengingat dalam sampel penelitian yang digunakan, yakni kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang tidak dimekarkan sebanyak 2 kali diantaranya baru dimekarkan pada tahun 1999.

Sampel Daerah Penelitian

Metode sampel yang di gunakan yaitu *purposive sampling* yaitu menetapkan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Pada penelitian ini kriteria yang digunakan adalah: (1) kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang tidak dimekarkan sebanyak 2 kali, (2) kabupaten/ kota di Provinsi Lampung yang masa pemerintahannya lebih dari 10 tahun, Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 10 kota/ kabupaten.

Spesifikasi Model Penelitian

Analisis data menggunakan model regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh PDRB per kapita (PDRBpk), pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan (GEE), dan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan (GHE)

terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Model umum dari analisis ini adalah:

$$IPM_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 PDRBpk_{i,t} + \beta_2 GEE_{i,t} + \beta_3 GHE_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

$IPM_{i,t}$ = Indeks Pembangunan Manusia, diukur dalam indeks

$PDRBpk_{i,t}$ = PDRB per kapita, diukur dalam rupiah per tahun

$GEE_{i,t}$ = Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, diukur dalam rupiah per tahun

$GHE_{i,t}$ = Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, diukur dalam rupiah per tahun

β_0 = Intersep

β_i = Koefisien variabel bebas

$\varepsilon_{i,t}$ = Variabel gangguan

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penghitungan Regresi

Setelah model persamaan regresi dinyatakan lolos uji identifikasi, proses selanjutnya adalah melakukan estimasi model panel data dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Sesuai dengan hasil uji spesifikasi Hausman (*Hausman Spesifikasi Test*), dalam penelitian ini persamaan regresi dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Output dari pengolahan dengan menggunakan model *fixed effect* diperlihatkan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 6, maka dapat kita tulis persamaan regresi:

$$IPM_{i,t} = 69,12332 + 1,31E-07PDRBpk_{i,t} + 1,93E-12GEE_{i,t} + 5,69E-12GHE_{i,t}$$

Tabel 2. Hasil Estimasi Panel Data dengan *Fixed Effect Model* dengan Pembobotan (*Cross Section Weight*)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistics	Prob.
C	69.12332	0.120097	575.5634	0.0000
PDRBPK	1.31E-07	2.04E-08	6.432484	0.0000
GEE	1.93E-12	7.19E-13	2.689392	0.0107
GHE	5.69E-12	2.76E-12	2.065654	0.0459
R ²	0.992830			
F-statistics	426.9466			

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah melakukan serangkaian pengujian, baik secara statistik maupun uji asumsi klasik maka kemudian dilakukan analisis ekonomi dan pembahasan terhadap hasil estimasi yang diperoleh. Dalam hal ini akan dianalisis pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen serta analisis nilai *fixed effect* pada intersep dalam model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM).

Pengaruh PDRB per Kapita Terhadap Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil estimasi regresi yang telah didapat, nilai koefisien regresi PDRB per kapita adalah sebesar $1,31E-07$ dengan tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti setiap peningkatan PDRB per kapita sebesar Rp 1 juta akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sebesar 0,13 *ceteris paribus*. Terbukti sesuai hipotesa penelitian bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ranis dkk (2000) bahwa pertumbuhan GDP per kapita secara signifikan mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH). Razmi (2012) pun juga memiliki hasil penelitian yang sama, menurut penelitiannya GDP per kapita dan tingkat kelulusan sekolah dasar memiliki pengaruh positif pada pembangunan manusia.

Berdasarkan koefisien regresinya, memang kontribusi PDRB per kapita cukup kecil, namun berdasarkan Tabel 2 koefisien PDRB per kapita ini paling besar dibandingkan variabel lain seperti pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan. Hal ini tak lain karena dengan adanya peningkatan PDRB per kapita akan langsung dirasakan masyarakat manfaatnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Saat dirasa ingin meningkatkan pengetahuannya, dapat langsung membeli buku yang diperlukan, saat sedang sakit bisa langsung berobat ke dokter ataupun rumah sakit. Peningkatan PDRB per kapita, seseorang dapat meningkatkan daya belinya (konsumsi) guna peningkatan kualitas hidupnya.

Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Pendidikan Terhadap Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

Variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan menunjukkan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia. Nilai koefisien regresi variabel pengeluaran pendidikan berdasarkan Tabel 6 adalah sebesar $1,93E-12$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti setiap peningkatan Rp 1 Milyar pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung sebesar 0,00193 *ceteris paribus*. Pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan IPM sesuai dengan hipotesis penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ranis dkk (2000) yang mengatakan bahwa pembangunan manusia secara signifikan dipengaruhi oleh belanja pemerintah untuk pelayanan bidang sosial (pendidikan dan kesehatan). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan Mankiw (2005) bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Modal manusia dapat mengacu pada pendidikan, namun juga dapat digunakan untuk menjelaskan jenis investasi manusia lainnya yaitu investasi yang mendorong ke arah populasi yang sehat yaitu kesehatan.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Koefisien pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pengeluaran pendidikan fungsi pendidikan memiliki pengaruh yang paling kecil dibanding variabel lain. Kecilnya pengaruh pengeluaran pendidikan ini memang membingungkan. Hal ini mengingat bahwa gelontoran dana yang direalisasikan pemerintah sudah sangat besar, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 sebesar 20%. Pada tahun tertentu bahkan realisasinya 30% dari total APBD.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Fungsi Kesehatan Terhadap Pembangunan Manusia Provinsi Lampung

Pengaruh variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap pembangunan manusia berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 2 memiliki koefisien sebesar $5,69E-12$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti setiap peningkatan Rp 1 Milyar pengeluaran kesehatan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar $0,00569$ *ceteris paribus*. Pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap pembangunan manusia sesuai dengan hipotesis penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan oleh Ranis dkk (2000), bahwa pembangunan manusia yang diwakili oleh angka harapan hidup secara signifikan dipengaruhi belanja pemerintah untuk pelayanan bidang sosial (pendidikan dan kesehatan). Penelitian Razmi (2012) juga memperoleh hasil yang sama. Dalam penelitiannya Razmi mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengeluaran kesehatan pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Realisasi anggaran kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tiap kabupaten/kota cukup besar dan telah memenuhi ketentuan 10% dari total APBD. Realisasi dana itu dialokasikan salah satunya untuk meningkatkan dan memperbanyak fasilitas kesehatan bagi masyarakatnya, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Posyandu.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis ekonomi dan pembahasan tentang determinan pembangunan manusia Provinsi Lampung dengan estimasi model *Ordinary Least Square* (OLS) dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. PDRB per kapita kabupaten/ kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Variabel PDRB per kapita memiliki tingkat pengaruh signifikansi 99% dan memiliki koefisien regresi sebesar $1,31E-07$. Hal ini berarti setiap peningkatan PDRB per kapita sebesar Rp 1 juta akan meningkatkan IPM sebesar $0,13$ *ceteris paribus*.

2. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan memiliki tingkat pengaruh signifikansi 95% dan memiliki koefisien regresi sebesar $1,93E-12$. Hal ini berarti setiap peningkatan pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan sebesar Rp 1 Milyar akan meningkatkan IPM sebesar 0,00193 *ceteris paribus*.
3. Pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan kabupaten/kota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan memiliki tingkat pengaruh signifikansi 95% dan memiliki koefisien regresi sebesar $5,69E-12$. Hal ini berarti setiap peningkatan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan sebesar Rp 1 Milyar akan meningkatkan IPM sebesar 0,00569 *ceteris paribus*.
4. Secara bersama-sama variabel PDRB per kapita, variabel pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan, dan variabel pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan tiap kabupaten/kota secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel IPM tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Pengeluaran per kapita yang menggambarkan daya beli masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Lampung perlu ditingkatkan, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan PDRB per kapita. Peningkatan daya beli masyarakat dapat meningkatkan pola konsumsi terhadap barang dan jasa yang akan meningkatkan kesejahteraan hidup.
2. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun akan membuat peningkatan PDRB per kapita menjadi lambat sehingga diperlukan usaha-usaha konkrit dan sungguh-sungguh terhadap pengendalian jumlah penduduk, misalnya seperti yang telah disarankan dalam penelitian ini, yakni melalui Program Keluarga Berencana (KB).
3. Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan dan kesehatan perlu dievaluasi dan direncanakan kembali dengan baik oleh pemerintah

daerah kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi perihal pengontrolan keefektifitasan alokasi dana yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan IPM. Hal ini mengingat realisasi anggaran pendidikan dan kesehatan sudah memenuhi aturan undang-undang bahwa realisasi untuk anggaran pendidikan adalah 20% dari APBD, sedangkan anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD.

4. Untuk penyempurnaan model dalam penelitian ini disarankan kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen yang lainnya, seperti variabel distribusi pendapatan, rasio ketergantungan, pengeluaran konsumsi rumah tangga, kapabilitas SDM, produktivitas tenaga kerja, dan variabel-variabel lain yang relevan guna memberikan hasil yang lebih baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Adeyemi, S.L., Ijaiya, G.T., Ijaiya, M.A., Kolawole, S.D. 2006. *Determinants of Human Development in Sub-Saharan Africa*. African Journal of Economic Policy. Vol. 13, No. 2, pp 15.
- Bagolin, Izete. 2004. *Human Development Index (HDI)-A Poor Representation to Human Development Approach*. Brasil.
- Bappeda, BPS. 2007. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2006*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- Bappeda, BPS. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2007*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- Bappeda, BPS. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2010*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- Bappeda, BPS. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 2011*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- Bappenas, BPS, UNDP. 2005. *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004*. BPS, Jakarta.
- BPS. 2009. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2009*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2009. *Lampung Dalam Angka 2009*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.

- BPS. 2010. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2010*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2010. *Lampung Dalam Angka 2010*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2011. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung Tahun 2011*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2011. *Lampung Dalam Angka 2011*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2012. *Lampung Dalam Angka 2012*. BPS Provinsi Lampung. Lampung.
- BPS. 2013. *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi Tahun 2003-2012*. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 11 Juni 2013.
- Chakraborty, Shankha. 2002. [Endogenous Lifetime and Economic Growth](#). Working Papers. [Department of](#) Economics. Portland: University of Oregon.
- Lai, Dejian. 2003. *Principal Component Analysis on Human Development Indicators of China*. Social Indicators Research. Vol. 61, No. 3, pp. 319-330.
- Mankiw, N. Gregory. 2005. *Macroeconomics* 6th Edition, Worth Publishers 41 Madison Avenue New York, NY.
- Maqin, Abdul. 2007. *Indeks Pembangunan Manusia: Tinjauan Teoritis dan Empiris di Jawa Barat*. FE Universitas Pasundan, Sumedang.
- Ram, Rati. 2009. *Intercountry Inequality in Human Development: a 30-year Perspective*. Journal of Economic Studies. Vol. 36, Iss: 5, pp 481-489.
- Ranis, Gustav. 2004. [Human Development and Economic Growth](#). [Working Papers](#) 887. Economic Growth Center. New Haven: Yale University.
- Ranis, Gustav., Stewart, F., Ramirez, A. 2000. *Economic Growth and Human Development*. World Development Vol. 28, No. 2, pp. 197 - 219.
- Razmi, M.J. 2012. *Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran*. Journal of Knowledge Management, Economics, and Information Technology. Iss: 5.
- Sen, A.K. 1999. *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press.
- Todaro, Michael P & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- UI Haq, Mahub. 1998. *Reflections on Human Development*. Oxford. CUP.
- UNDP. 1990. *Human Development Report*. New York: Oxford University Press.